

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2022

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.2, LD 2022/ NO. 2, 138 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Untuk pengelolaan keuangan daerah secara tertib berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban dengan Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2016 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Perda ini menggantikan Perda sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan terkini. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan efisiensi. Struktur APBD disusun secara rinci mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai prinsip akuntansi pemerintah. Perda ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Maret 2022.
- Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Jumlah Penjelasan 27 halaman.